

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Sanchita Basu Das and et al, 2013. *“The ASEAN Economic Community: a work in Progress”*. Singapore; ISEAS, Asian Development Bank.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *“Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M; dan Donnelly, James H. and Konopaske. 2012. *“Organizations: Behavior, Structure, Processes”*. New York: McGraw-Hill.
- Ikhsan, M., *“Pengelolaan Aset Organisasi yang Berbasis Pengetahuan”*. Jurnal Forum Inovasi, Capacity Building & Good Governance, Vol. 4, November 2002, h.11, PPs PSIA-FISIP UI.
- Neil J. Smelser and Richard Swedberg, 2005. *“The Handbook of Economics Sociology”*. Princeton University Press.
- Pasolong, Harbani, 2013. *“Metode Penelitian Administrasi Publik”*. Bandung; Alfabeta.
- Sparringa, Daniel, A., 2001. *“Wacana Pemerintahan yang baik Good Governance dan Transisi Demokrasi”*. Jurnal Forum Inovasi, Capacity Building & Good Governments, PPs PSIA-FISIP UI Vol.1,p.53-58.
- Sugiyono, 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Tolbert, Pamela S and Hall, Richard H. 2009. *“Organizations: Structures, Processes, and Outcomes”*. New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Van Rooyen, E.J., 1999. *“Capacity Building in Developing Countries: Human and Environmental Dimensions”*, Agrica Today, Vol. 46 No. 2: Hal. 32-36.
- Whittaker James B, 1995. *“The Governments Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and performance Measurement”*. Educational Service Institute, Arlington, Virginia.
- Widodo Joko, 2001. *“Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah”*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yuwono Teguh, 2003. *“Capacity Building and Local Government: Concept and Analysis”*. Makalah pada *seminar Internasional Democracy and Local Politics* diselenggarakan oleh PSSAT UGM, STPMD “APMD, UAJY, Yogyakarta, 7-8 Januari.

Referensi Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
9. Peraturan Daerah (PERDA) No 05 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Referensi Penelitian Terdahulu:

1. Monika Aring, 2015. "ASEAN Economic Community 2015: Enhancing competitiveness and employability through skill development".
2. Riset Kajian PKRB 2014. "Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA".
3. Muhammad Afdi Nizar dkk, 2014. "Laporan Dampak ASEAN Economic Community terhadap Sektor Industri dan Jasa serta Tenaga Kerja di Indonesia".
4. Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Terbuka, 2015. "Aplikasi Strategi Diferensiasi Produk Pakaian Jadi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".

5. Laporan Akhir Pemerintah Kota Jambi, 2016. “Analisis Kualitas Pekerja Provinsi Jambi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.
6. Laporan Akhir Pemerintah Kota Balikpapan, 2015. “Penyusunan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kota Balikpapan”. PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.
7. Capacity Building, 2012. “Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”. Tim Peneliti STIA-LAN Makassar 2012.
8. Laporan Pendahuluan KEMENPANRB, 2016. “Audit Organisasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Perekonomian dan Kemaritiman, serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta.

Referensi Jurnal Internasional :

1. Michael G. Plummer, Peter A. Petri and Fan Zha, 2014. “Assessing the impact of ASEAN economic integration on labour markets”. ILO Asia – Pasific Working Paper Series.
2. Sie Maria Eunike Santoso, 2015. “The Differences between Indonesia and Singapore in Facing the ASEAN Economic Community”. ____.
3. Rafaelita M. Aldaba, 2013. “ASEAN Economic Community 2015: Labor Mobility and Mutual Recognition Arrangements on Professional Services”. Philippine Institute for Development Studies.
4. Muttanachai Sttipun, 2012. “Readiness of accounting students in the ASEAN Economic Community: An empirical study from Thailand”. Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Thailand.
5. Guido Benny, Tham Siew Yean, Rashila Ramli, 2015. “Public Opinion on the Formation of the ASEAN Economic Community: An Exploratory Study in three ASEAN Countries”. IJAPS, Vol. 11, No. 1,85-114, Universiti Saings Malaysia, 2015.
6. Jurgen Ruland, 2016. “Why (most) Indonesian businesses fear the ASEAN Economic Community: struggling with Southeast Asia’s regional corporatism. Vol. 37. No. 6, 1130-1145. Third World Quarterly, 2016.
7. Monika Aring, 2015. “ASEAN Economic Community 2015: Echancing competitiveness and employability through skill development”. ILO Asia – Pasific Working Paper Series.

Referensi Jurnal Nasional :

1. Mafizaton Nurhayati, _____. “ Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN dalam rangka menuju masyarakat Ekonomi ASEAN”. Fekultas Ekonomi dan Bisnis, Unversitas Mercu Buana Jakarta.

2. Masnur Tiurmaida Malau, 2014. “Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009.
3. Elfia Farida, _____. “Efektivitas Piagam ASEAN (*ASEAN CHARTER*) Bagi ASEAN sebagai Organisasi Internasional: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Pudjo Utomo, 2014. “Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi di Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 7 No. 2. 2014.
5. Atep Abdu Rofiq, 2014. “Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap Pembangunan Indonesia”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
6. Bagus Prasetyo, _____. “Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia menghadapi MEA”. Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009.
7. Muhammad Fadli, 2014. “Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009.
8. P. Julius F. Nagel, _____. “Peluang dan Tantangan UKM Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Unika Widya Mandala, Surabaya.
9. Humphrey Wangke, 2014. “Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-DRI. ISSN 2088-2351.

Referensi Internet :

<http://jogja.antaraneews.com>

<http://www.jogjakota.go.id>

<http://jogja.tribunnews.com>

<http://jogjadaily.com>